

## BAB II

### PRINCIPLED PLURALISM

#### Introduksi

Principled pluralism merupakan suatu pandangan yang berasal dari theologi Reformed.<sup>1</sup> Para theolog Reformed mula-mula seperti John Calvin, John Knox, dan Ulrich Zwingli belum memiliki konsep principled pluralism itu sendiri tetapi meletakkan dasar bagi ide tersebut dan akan dikembangkan oleh theolog Reformed selanjutnya. Namun tidak berarti bahwa semua penganut theologi Reformed memihak pada konsep ini. Dalam buku *God and Politics: Four Views on the Reformation of Civil Government*, editor Gary Scott Smith, terdapat empat pandangan mengenai pemerintah, yaitu theonomy, principled pluralism, Christian America, dan national confessionalism.<sup>2</sup> Principled pluralism hanya salah satu di antaranya.

Secara umum principled pluralism dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang memahami serta menerima akan keberagaman di dalam kehidupan publik, mengenali akan struktur-struktur otoritas yang berbeda-beda yang beroperasi di dalam berbagai bidang hidup sosial dan memiliki dasar untuk menentang totalitarianisme dan individualisme.<sup>3</sup> Principled pluralism memandang negara sebagai salah satu struktur sosial yang memiliki otoritas yang sah pada suatu wilayah hidup tertentu, dan harus menerima struktur sosial lainnya di luar dari dirinya yang juga diberikan

---

<sup>1</sup> Corwin E. Smidt, "The Principled Pluralist Perspective," in *Church, State and Public Justice: Five Views*, ed. P. C. Kemeny (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2007), 127.

<sup>2</sup> Gary Scott Smith, ed., *God and Politics: Four Views on the Reformation of Civil Government : Theonomy, Principled Pluralism, Christian America, National Confessionalism* (Phillipsburg, N.J: P & R Publishing, 2010).

<sup>3</sup> Smidt, "The Principled Pluralist Perspective," 127.

otoritas bagi wilayah hidup yang lain. Jadi negara memiliki otoritas yang didelegasikan kepadanya yang berasal dari Allah, tetapi negara bukan satu-satunya yang didelegasikan otoritas.<sup>4</sup>

Principled pluralism melihat bahwa walaupun kuasa Allah dilaksanakan secara tidak langsung (indirectly) dan dimediasi melalui jabatan-jabatan, otoritas, dan institusi di dunia, Allah tetap berdaulat sepenuhnya. Otoritas yang didelegasikan ini tidak pernah diberikan Allah hanya kepada satu orang atau satu institusi. Bidang politik, ekonomi, pendidikan, pernikahan, dan lainnya tidak boleh ada satupun yang menguasai bidang lainnya. Setiap bidang memiliki otoritas dan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka negara pun harus dibatasi kuasanya melalui konstitusi.<sup>5</sup>

### **Dasar Theologis Principled pluralism**

Principled pluralism berpandangan bahwa teori politik tidak dapat dibentuk dari kutipan langsung ayat-ayat Alkitab tetapi harus melalui pengantara yang menengahnya dalam bentuk kerangka (*framework*) atau cara pandang (*worldview*).<sup>6</sup> Kerangka ini mengandung pengertian menyeluruh dari Alkitab untuk melihat setiap wilayah hidup manusia dan non-manusia. Principled pluralism ini tidak dibangun oleh hermeneutika pietis dan pendekatan pembuktian teks Alkitab langsung karena

---

<sup>4</sup> Smidt, 127.

<sup>5</sup> Smidt, 127.

<sup>6</sup> Gordon J. Spykman, "The Principled Pluralist Position," in *God and Politics: Four Views on the Reformation of Civil Government : Theonomy, Principled Pluralism, Christian America, National Confessionalism*, ed. Gary Scott Smith (Phillipsburg, N.J: P & R Publishing, 2010), 78.

pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa Alkitab adalah kumpulan kebenaran yang berlaku sepanjang masa yang telah menyediakan aplikasi-aplikasi yang siap untuk segera digunakan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun.<sup>7</sup> Namun meskipun Alkitab bukanlah suatu buku teori tentang bagaimana membangun pemerintahan sipil atau pun buku mengenai kebijakan publik, tidak ada satu pun aspek hidup yang tidak berada di bawah prinsip Alkitab.

Dalam Stone Lectures di Princeton Seminary tahun 1898, Kuyper memberi judul kuliah pertamanya Calvinism a Life-System.<sup>8</sup> Di sana Kuyper menjelaskan:

If the battle is to be fought with honor and with hope of victory, then principle must be arrayed against principle: then it must be felt that in Modernism the vast energy of an all embracing life-system assails us, then also it must be understood that we have to take our stand in a life-system of equally comprehensive and far-reaching power. And this powerful life-system is not to be invented nor formulated by ourselves, but is to be taken and applied as it presents itself in history.<sup>9</sup>

Kuyper senada dengan James Orr, dalam konteks perlawanan terhadap budaya pasca-pencerahan yang sedang mendominasi dunia barat, memandang bahwa respons Kristen secara sepotong-sepotong tidak memadai di dalam melawan modernisme.<sup>10</sup> Orr berpendapat bahwa komitmen kepada Kristus termasuk membawa cara pandang tentang Allah, kemanusiaan, dosa, penebusan, tujuan Allah dalam ciptaan dan sejarah, dan tujuan manusia. Semua ini membentuk worldview.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Spykman, 80.

<sup>8</sup> Kuyper, Lectures on Calvinism, 9.

<sup>9</sup> Kuyper, 11,12.

<sup>10</sup> Bartholomew, Contours of the Kuyperian Tradition, 105.

<sup>11</sup> James Orr, The Christian View of God and the World (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013), 4,5.

Konsep worldview dalam Kuyper tidak dipaparkan dalam teori yang ketat.<sup>12</sup> Para penerus Kuyper (Kuyperian) yang akan menyempurnakan konsep tersebut. Wolters memberikan definisi *worldview* sebagai “the comprehensive framework of one’s basic beliefs about things”<sup>13</sup> Wolters berpendapat bahwa Alkitab berbicara secara inti kepada segala sesuatu di dalam hidup manusia dan dunia ini, termasuk teknologi, ekonomi, dan sains.<sup>14</sup> Michael Goheen dan Craig Bartholomew senada dengan Wolters, mendefinisikan worldview sebagai an articulation of the basic beliefs embedded in a shared grand story that are rooted in a faith commitment and that give shape and direction to the whole of our individual and corporate lives.<sup>15</sup>

Kerangka yang dipegang oleh theologi Reformed, khususnya neo-Calvinisme adalah narasi penciptaan-kejatuhan-penebusan. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya termasuk kebudayaan manusia menurut rancangan-Nya, tetapi dosa telah merusaknya, baik kebudayaan manusia maupun alam ini, sehingga seluruh ciptaan harus ditebus oleh Yesus Kristus. Maka dunia ini bersifat sakral seluruhnya dan mengalami berkat, penghakiman, dan penebusan yang berasal dari Allah. Meskipun tradisi di luar Reformed juga mengenal skema ini, tetapi di dalam theologi Reformed narasi ini mendapatkan tempat yang sentral.<sup>16</sup> Berikut pemaparan *worldview* alkitabiah penciptaan-kejatuhan-penebusan.

---

<sup>12</sup> Bartholomew, *Contours of the Kuyperian Tradition*, 106.

<sup>13</sup> Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview*, 2nd ed. edition (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2005), 2.

<sup>14</sup> Wolters, 8.

<sup>15</sup> Michael W. Goheen and Craig G. Bartholomew, *Living at the Crossroads: An Introduction to Christian Worldview*, 10.2.2008 edition (Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2008), 23.

<sup>16</sup> Smidt, “The Principled Pluralist Perspective,” 128.

## Penciptaan

Menurut Richard Mouw, Calvinist memiliki penekanan yang kuat tentang signifikansi narasi penciptaan dalam kitab Kejadian melebihi golongan Kristen lainnya.<sup>17</sup> Allah yang menciptakan dunia. Allah berfirman maka dunia ini jadi. Namun bukan berarti setelah dunia ini jadi maka Allah berhenti berfirman. Allah terus berfirman dan memerintah ciptaan-Nya.<sup>18</sup> Firman Allah memiliki cakupan komprehensif kepada manusia dan alam. Kuyper menjelaskan:

Consequently there are ordinances of God for our bodies, for the blood that courses through our arteries and veins, and for our lungs as the organs of respiration. And even so are there ordinances of God, in logic, to regulate our thoughts; ordinances of God for our imagination, in the domain of aesthetics; and so, also, strict ordinances of God for the whole of human life in the domain of morals.<sup>19</sup>

Maka seluruh ciptaan harus berespons pada firman Allah yang telah mengatur tatanan ciptaan itu.

Setelah berfirman dan ciptaan itu jadi, Allah mengumumkan bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Secara eksplisit manusia dan alam yang dicipta dikatakan baik oleh Allah. Institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya juga dikatakan baik oleh Allah tetapi secara implisit.<sup>20</sup> Saat itu manusia hanya ada Adam dan Hawa, belum ada institusi pemerintah atau keberadaan masyarakat hingga hari

---

<sup>17</sup> Richard J. Mouw, *The Challenges of Cultural Discipleship: Essays in the Line of Abraham Kuyper* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2011), 108.

<sup>18</sup> Goheen and Bartholomew, *Living at the Crossroads*, 36.

<sup>19</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 78.

<sup>20</sup> Smidt, "The Principled Pluralist Perspective," 129.

keenam penciptaan. Maka Kejadian 1-3 belum menulis secara eksplisit akan keluarga, gereja, pendidikan, seni, dan sebagainya.

Dalam penciptaan, Allah juga memberikan mandat budaya pada manusia. Allah berkata kepada Adam dan Hawa "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu" (Kej 1:28). Ayat ini bukan hanya mengenai reproduksi manusia tetapi juga mengenai aktivitas kultural yang harus dikembangkan oleh manusia. Manusia bukan hanya menjalani hidup apa adanya sebatas ketika mereka baru dicipta oleh Tuhan, tetapi ada mandat dari Tuhan untuk mengatur dan mengembangkan kebudayaan dari taman menuju kepada kota menurut kehendak Allah.

Lebih lanjut, mandat ini diberikan Allah kepada manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Maka tugas yang diemban oleh manusia bukan hanya tugas biasa, tetapi bersifat kreatif. Karena manusia adalah gambar dan rupa dari Allah yang kreatif maka manusia juga mengimitasi sifat kreatif Allah.<sup>21</sup> Allah juga mendelegasikan beberapa otoritas kepada manusia dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka walaupun secara ultimat Allah tetap yang berdaulat penuh.

Mandat ini juga yang menjadi fondasi akan otoritas pemerintah yang mengatur kehidupan publik. Bahkan jika kejatuhan manusia tidak pernah terjadi sekalipun, menurut Mouw, manusia tetap perlu membuat regulasi yang berfungsi untuk mengatur kehidupan publik.<sup>22</sup> Misalnya pengaturan mengenai lampu lalu lintas yang

---

<sup>21</sup> Smidt, 129.

<sup>22</sup> Richard J. Mouw, *Abraham Kuyper: A Short and Personal Introduction* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2011), 53.

harus memiliki warna yang standar untuk diberlakukan di semua wilayah. Regulasi seperti ini tetap harus diberlakukan sekalipun kejatuhan manusia tidak terjadi. Jika tidak diberlakukan standar warna lampu lalu lintas maka akan menimbulkan kekacauan.<sup>23</sup>

Di sini Kuyper memiliki pandangan yang berbeda dengan Mouw. Kuyper berpendapat bahwa negara ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Kuyper menyatakan,

For, indeed, without sin there would have been neither magistrate nor state-order; but political life, in its entirety, would have evolved itself, after a patriarchal fashion, from the life of the family. Neither bar of justice nor police, nor army, nor navy, is conceivable in a world without sin; and thus every rule and ordinance and law would drop away, even as all control and assertion of the power of the magistrate would disappear, were life to develop itself, normally and without hindrance, from its own organic impulse. Who binds up, where nothing is broken? Who uses crutches, where the limbs are sound?<sup>24</sup>

Karena menilai negara ada setelah kejatuhan, maka Kuyper lebih banyak membahas tentang negara dengan tema kejatuhan. Karena tidak jelasnya posisi creational order dari negara dalam pandangan Kuyper, Herman Dooyeweerd mencoba menyeimbangkan pandangan Kuyper tersebut dengan mengaitkan negara dengan penciptaan dan kejatuhan.<sup>25</sup> Dooyeweerd mengakui akan adanya efek dosa yang memaksa untuk lahirnya institusi seperti negara dan gereja, tetapi bukan berarti bukan berarti institusi yang diakibatkan oleh kejatuhan tersebut tidak terdapat creation order di dalamnya. Dooyeweerd menyatakan,

---

<sup>23</sup> Smidt, "The Principled Pluralist Perspective," 130.

<sup>24</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 80.

<sup>25</sup> Jeong Kii Min, *Sin and Politics: Issues in Reformed Theology*, First printing edition (New York: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2009), 109.

The fall affects natural phenomena, which man can no longer control. It expresses itself in theoretical thought led by an idolatrous ground motive. It appears in the subjective way in which man gives form to the principles established by God in his creation as norms for human action. The fall made special institutions necessary, such as the state and the church in its institutional form. But even these special institutions of general and special grace are based upon the ordinances that God established in his creation order. Neither the structures of the various aspects of reality, nor the structures that determine the nature of concrete creatures, nor the principles which serve as norms for human action, were altered by the fall. A denial of this leads to the unscriptural conclusion that the fall is as broad as creation; i.e., that the fall destroyed the very nature of creation. This would mean that sin plays a self-determining, autonomous role over against God, the creator of all. Whoever maintains such a position robs God of his sovereignty and grants satan a power equal to that of the origin of all things.<sup>26</sup>

Karena creation order tidak absen dalam bidang negara setelah kejatuhan, maka dapat dikatakan bahwa neo-Calvinisme memiliki pandangan yang lebih positive terhadap otoritas pemerintah. Negara bukan hanya berfungsi untuk menahan dosa, tetapi juga ikut bersama struktur-struktur otoritas lainnya dalam proses pengembangan penciptaan. Namun baik Kuyper maupun Dooyeweerd sama-sama dengan jelas melihat bahwa karakter pemaksaan (coercive) di dalam institusi negara adalah sebagai konsekuensi dari dosa.<sup>27</sup>

### Kejatuhan

Jika manusia taat kepada Allah maka ia akan hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerintah seluruh aspek ciptaan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu yang harmonis. Namun itu tidak terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Setiap relasi yang berhubungan dengan manusia menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah, dengan alam, atau pun sesama

---

<sup>26</sup> Herman Dooyeweerd, *Roots Of Western Culture* (Paideia Press / Reformational Publishing Project, 2012), 60.

<sup>27</sup> Min, *Sin and Politics*, 110.

manusia. Dalam pribadi seorang manusia, dosa merusak aspek seperti emosi dan nalar, menyebabkan manusia melakukan kebohongan, percabulan, pencurian dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Dosa secara komunal banyak termanifestasi di dalam penyembahan berhala yang sering kali menjadi pusat kebudayaan manusia yang membentuk aspek-aspek sosial dan kultural yang arahnya adalah pemberontakan kepada Allah.<sup>28</sup> Bob Goudzwaard memberikan tiga pernyataan tentang dosa manusia. Pertama, setiap manusia melayani ilah; kedua, setiap manusia ditransformasi menjadi gambar dan rupa dari ilahnya; dan ketiga, secara komunal manusia mencipta dan membentuk struktur masyarakat menurut gambar dan rupanya sendiri.<sup>29</sup> Keberdosaan Adam berpengaruh sampai pada keturunannya: “oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa” (Roma 5:19).

Pengaruh dosa mencakup seluruh ciptaan dan semua aspek kehidupan tetapi tidak secara mutlak dan tidak rusak secara total. Wolters menjelaskan bahwa dosa tidak menyalakan ciptaan dan tidak menjadi identik dengan ciptaan. Ciptaan dan dosa tetap dua hal yang berbeda walaupun jalinan keduanya sangat dekat di dalam pengalaman hidup manusia.<sup>30</sup> Manusia tetap sebagai gambar dan rupa Allah meskipun telah menyimpang. Mereka yang tidak mengenal Allah yang benar tetap dapat melakukan perbuatan baik. Allah masih memberikan anugerah umum yang berlaku bagi semua orang.

---

<sup>28</sup> Goheen and Bartholomew, *Living at the Crossroads*, 49.

<sup>29</sup> Bob Goudzwaard, *Aid for the Overdeveloped West* (Toronto: Wedge Pub, 1975), 14.

<sup>30</sup> Wolters, *Creation Regained*, 57.

Anugerah umum adalah salah satu doktrin dari theologi Reformed yang membentuk pemikiran principled pluralism. Kuyper sendiri dijuluki sebagai theolog anugerah umum karena banyaknya elaborasi yang dia lakukan terhadap doktrin ini. Anugerah khusus diberikan Allah hanya kepada kaum pilihan-Nya tetapi anugerah umum diberikan Allah kepada semua orang, baik kepada kaum pilihan maupun yang bukan kaum pilihan. Dalam Matius 5:45 Yesus berkata bahwa Bapa “menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.” Kuyper tidak hanya melihat fungsi anugerah umum sebagai pengekan atau pembatas dosa saja, tetapi juga sebagai cara pandang dan cara praktek hidup sehari-hari. Kuyper menuliskan:

Common grace extends over our entire human life, in all its manifestations. There is a common grace that manifests itself in order and law; there is a common grace that manifests itself in prosperity and affluence; there is a common grace that becomes visible in the healthy development of strength and heroic courage of a nation; there is a common grace that shines in the development of science and art; there is a common grace that enriches a nation through inventiveness in enterprise and commerce; there is a common grace that strengthens the domestic and moral life; and finally there is a common grace that protects the religious life against an excessive degeneration.<sup>31</sup>

Kuyper menjelaskan lebih lanjut bahwa anugerah umum juga banyak bekerja di luar gereja:

Common grace has operated for ages in China and India without there being any church of Christ in those countries. We still enjoy the fruits that have come from common grace in Greece and Rome in the days when even the name of Christ's church had never yet been mentioned.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abraham Kuyper, *Common Grace*, ed. Nelson D. Kloosterman, 1 edition (Bellingham, WA: Lexham Press, 2015), 498.

<sup>32</sup> Kuyper, 301,302.

Begitu juga dengan Calvin yang berpendapat bahwa semua orang memiliki pikiran yang mengandung anggapan universal tentang suatu sikap adil dan teratur. Sehingga bagi Calvin tidak ada orang yang tidak mengerti bahwa keteraturan dan hukum diperlukan dalam berbagai hal.<sup>33</sup> Calvin bahkan mendorong orang Kristen juga belajar dari kebenaran yang diberikan Allah kepada orang non-Kristen. Mouw menuliskan bahwa anugerah umum menyediakan pijakan yang sama antara orang percaya dan orang tidak percaya dan dasar bagi keterlibatan orang Kristen di masyarakat luas.<sup>34</sup>

Namun, kejatuhan manusia tetap berpengaruh bagi natur otoritas publik. Sebelum kejatuhan, otoritas publik bertugas untuk memfasilitasi hubungan kerja sama antara bidang dalam masyarakat menurut mandat Allah. Tetapi setelah kejatuhan, pemerintah harus memegang pedang untuk menindak kejahatan dan memaksa orang untuk berbuat baik. Lebih lanjut, pemerintah sendiri telah tercemar oleh dosa dan sering memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Maka pemerintah yang seharusnya bertugas untuk menindak kejahatan, sering kali menjadi pelaku kejahatan yang lebih brutal karena mereka yang memegang kekuasaan.

### Penebusan

Allah tidak membiarkan ciptaan berada pada kondisi kejatuhan. Kristus datang mendamaikan relasi Pencipta dan ciptaan serta relasi sesama ciptaan. Penebusan

---

<sup>33</sup> John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia; London: Westminster John Knox Press, 1960), 272.

<sup>34</sup> Richard J. Mouw, *He Shines in All That's Fair: Culture and Common Grace* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2002).

bukan hanya berlaku bagi keselamatan jiwa seseorang tetapi merestorasi seluruh ciptaan dan memulihkan kembali fungsi pemerintah, ekonomi, pernikahan, dan institusi lainnya. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa segala makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin sangat merindukan untuk dibebaskan dari kesia-siaan (Roma 8:18-22). Langit dan bumi yang baru merujuk kepada ciptaan yang telah dimurnikan oleh Allah. Kuyper menjelaskan,

....the original plan of God was not neutralized, but continues full of majesty, and that God will thereby realize his world plan, that one day Christ will once again connect those parts and pieces of his creation, taken here as heaven and earth, under one head, that is, once again into one entirely organic, integrated, and connected reality.<sup>35</sup>

Paulus berkata “oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.” (Kolose 1:20). Maka penebusan membawa pemulihan kebaikan ciptaan melalui pencabutan dosa dan proses pengikisan efek-efek dosa.<sup>36</sup>

Penebusan bukanlah usaha untuk mengembalikan seluruh kebudayaan dunia kepada bentuk asalnya yang paling primitif. Wolters berpendapat bahwa penebusan adalah restorasi kebudayaan dan masyarakat kepada tahap pengembangannya masa kini (their present state development).<sup>37</sup> Perkembangan kebudayaan dunia saat ini misalnya kecanggihan teknologi memang sudah tercemar oleh dosa, namun bukan berarti penebusan mengembalikannya kepada teknologi zaman Adam dan Hawa. Penebusan menuntut bidang tersebut direformasi untuk kembali kepada struktur

---

<sup>35</sup> Kuyper, *Common Grace*, 577.

<sup>36</sup> Wolters, *Creation Regained*, 69.

<sup>37</sup> Wolters, 71.

penciptaan. Alkitab jelas menyatakan perkembangan dari taman menuju kota. Kota yang sudah tercemar oleh dosa tidak kembali menjadi taman ketika mengalami penebusan, tetapi menjadi kota baru yang telah ditransformasi.

Orang Kristen mempunyai kewajiban di dalam tugas penebusan setelah mereka sendiri ditebus oleh Allah. Tugas penebusan di sini bukan dalam bagian menebus dosa dan menyelamatkan orang berdosa, tetapi dalam arti tugas transformasi berbagai aspek ciptaan. Umat tebusan Allah harus mengerjakan pekerjaan penebusan Allah dalam keluarga, sekolah, politik, dan semua bidang. James K. A. Smith menuliskan,

While God's redemption is cosmic, not anthropocentric, it nonetheless operates according to that original creational scandal whereby humanity is commissioned as ambassador, and even co-creator, for the sake of the world. In an equally scandalous way, we are now commissioned as co-redeemers. Redemption is the re-orientation and re-direction of our culture-making capacities.<sup>38</sup>

Manusia kembali menjadi agen Allah untuk mengerjakan kebudayaan yang sesuai rancangan-Nya.

### **Unsur-Unsur Principled pluralism**

Istilah principled pluralism dicetuskan pertama kali oleh James W. Skillen<sup>39</sup> yang membaginya menjadi dua, yaitu structural pluralism dan confessional

---

<sup>38</sup> James K. A. Smith, "Redemption," *Comment Magazine*, accessed July 18, 2018, <https://www.cardus.ca/comment/article/redemption/>.

<sup>39</sup> Jonathan Chaplin, "The Point of Kuyperian Pluralism," *Comment Magazine*, November 1, 2013, <https://www.cardus.ca/comment/article/the-point-of-kuyperian-pluralism/>.

pluralism.<sup>40</sup> Skillen mendefinisikan structural pluralism sebagai keberagaman dari kompetensi organisasional dan responsibilitas sosial.<sup>41</sup> Ia berpendapat bahwa memang terdapat unsur historikal dalam proses terbentuknya keberagaman sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa adanya identitas yang unik dari bidang keluarga, sekolah, seni, sains, politik, dan lainnya, yang kualitas karakteristiknya tidak dapat ditentukan oleh seorang individu.<sup>42</sup> Menurut Gordon J. Spykman, structural pluralism berarti Allah mencipta dunia dengan berbagai struktur – pemerintahan sipil, pernikahan, keluarga, gereja, sekolah, pasar – yang mengatur hidup dan mengoordinasi interaksi sesama manusia.<sup>43</sup> Dengan melihat definisi-definisi di atas, jelas bahwa konsep tentang structural pluralism bukan sesuatu yang baru tetapi berasal dari konsep sphere sovereignty Kuyper.

Structural pluralism mengikuti prinsip sphere sovereignty yaitu setiap institusi dan asosiasi adalah ordinansi dari Allah. Setiap bidang dalam masyarakat memiliki otoritasnya sendiri yang tidak boleh merebut atau mendominasi otoritas bidang yang lain.<sup>44</sup> Ini merupakan rancangan Allah sejak semula sehingga bersifat normatif. Bidang-bidang tersebut tidaklah berdaulat secara ultimat tetapi hanya memiliki kedaulatan dalam tingkat tertentu saja di dalam wilayahnya sendiri. Menurut

---

<sup>40</sup> James W. Skillen, "The Theoretical Roots of Equal Treatment," in *Equal Treatment of Religion in a Pluralistic Society*, ed. Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper (Grand Rapids, Mich: Eerdmans Pub Co, 1998), 57.

<sup>41</sup> James W. Skillen, *Recharging the American Experiment: Principled Pluralism for Genuine Civic Community* (S.I. : Grand Rapids, Mich: Baker Pub Group, 1994), 83.

<sup>42</sup> Skillen, 83.

<sup>43</sup> Spykman, "The Principled Pluralist Position," 79.

<sup>44</sup> Spykman, 80.

Spykman setiap bidang memiliki identitas, tugas, dan hak khusus masing-masing yang diberikan oleh Allah.<sup>45</sup> Singkatnya, kedaulatan yang dimiliki oleh setiap bidang, sifatnya adalah diberikan Allah, dependen, diturunkan, didelegasikan, dan terbatas.<sup>46</sup> Hanya Allah yang memiliki kedaulatan ultimat. Allah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia secara konkrit dalam berbagai bidang misalnya otoritas orang tua di rumah, otoritas khotbah di gereja, otoritas guru di sekolah, otoritas pemerintah dalam administrasi negara demi keadilan publik.<sup>47</sup>

Bagian kedua dari principled pluralism adalah confessional pluralism. Konsep ini juga memiliki dasar dalam sphere sovereignty dari Kuyper tetapi belum dibedakan dengan jelas oleh Kuyper.<sup>48</sup> Spykman mendefinisikan confessional pluralism sebagai hak dari kelompok-kelompok agama yang berbeda untuk terlibat dalam kehidupan publik melalui institusi mereka masing-masing – sekolah, partai politik, persatuan buruh, tempat ibadah dan lainnya – dan memperkenalkan pandangan-pandangan mereka.<sup>49</sup> Berbeda dengan structural pluralism, confessional pluralism bukanlah normatif, karena bukan rancangan Allah sejak semula melainkan hasil dari kejatuhan manusia. Perumpamaan tentang lalang dan gandum adalah salah satu dasar Alkitab yang digunakan untuk mendukung konsep ini,<sup>50</sup> di mana tugas untuk memisahkan

---

<sup>45</sup> Spykman, “Sphere-Sovereignty in Calvin and Calvinist Tradition,” 167.

<sup>46</sup> Spykman, “The Principled Pluralist Position,” 95.

<sup>47</sup> Spykman, 95.

<sup>48</sup> Chaplin, “The Point of Kuyperian Pluralism.”

<sup>49</sup> Spykman, “The Principled Pluralist Position,” 79.

<sup>50</sup> Abraham Kuyper, *Our Program: A Christian Political Manifesto*, ed. Harry Van Dyke (Bellingham, WA: Lexham Press, 2015), 68.

mana iman yang sejati dan yang tidak sejati bukanlah tugas gereja atau negara, tetapi tugas Kristus sendiri yang akan dilakukan-Nya pada kedatangan yang kedua.

Lahirnya konsep principled pluralism tidak lepas dari konteks tertentu. Kuyper menghadirkan konsep sphere sovereignty di antara dua pandangan, yaitu popular-sovereignty dari individualisme liberal yang mereduksi otoritas dan politik kepada kumpulan kehendak individu, dan state-sovereignty dari otoritarianisme konservatif dan sosialisme sentralis yang membuat semua otoritas sosial harus seizin negara.<sup>51</sup> Popular-sovereignty yang Kuyper lawan adalah Revolusi Perancis yang atheistik, sedangkan state-sovereignty yang ia hadapi adalah Hegelian School of Germany yang panentheistik.

Bagi Kuyper, di satu sisi ada yang patut disyukuri bahwa Revolusi Prancis telah menghilangkan persekongkolan antara spiritual dan politik yang terdapat di Katolik Roma, sehingga menjadi permulaan akan kebebasan politik.<sup>52</sup> Kuyper mengatakan bahwa :

“In the French Revolution; honor of liberty had been saved. Of course, those who cultivated the sinful principle of this revolution and its crimes remain guilty; God will judge them. But nonetheless, in spite of guilt and judgement Europe had received blessing!”<sup>53</sup>

Di sisi lain Kuyper juga melihat bahwa kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Revolusi Prancis bukanlah ketika mereka menggulingkan dinasti Bourbon, tetapi

---

<sup>51</sup> Chaplin, “The Point of Kuyperian Pluralism.”

<sup>52</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 109.

<sup>53</sup> Abraham Kuyper, “Calvinism: Source and Stronghold of Our Constitutional Liberties,” in *Abraham Kuyper: A Centennial Reader*, ed. James D Bratt (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998), 313.

di dalam perlawanan mereka terhadap otoritas ilahi yang dikumandangkan dalam slogan *ni Dieu ni maître* (no gods, no masters).<sup>54</sup>

Keberatan Kuyper pada Hegelian School of Germany adalah dihapusnya batas antara Allah dan ciptaan. Mereka memandang negara sebagai standar moral dan hukum negara pasti adil. Negara dianggap sebagai ilah sekular.<sup>55</sup> Bagi Kuyper seorang Calvinist hanya mengakui Allah yang berdaulat sebagai sumber segala otoritas manusia. Kuyper menjelaskan,

Therefore in opposition both to the atheistic popular-sovereignty.... And the pantheistic state-sovereignty of German philosophers, the Calvinist maintains the Sovereignty of God, as the source of all authority among men. The Calvinist upholds the highest and best in our aspirations by placing every man and every people before the face of our Father in heaven.<sup>56</sup>

Perlawanan terhadap dua golongan ekstrem ini juga tetap diperjuangkan oleh Kuyperian yang memegang principled pluralism, namun istilah yang dipakai adalah individualisme dan kolektivisme. Menurut Robert Nisbet, teori politik modern secara fundamental hanya tiga, yaitu individualisme, kolektivisme, dan pluralisme. Teori-teori lain hanyalah variasi dari ketiga ini. Kolektivis memegang pandangan bahwa ada satu otoritas pusat birokrasi megastruktur yang mengendalikan hidup setiap bidang masyarakat, seperti negara-kota di zaman Yunani kuno, kekaisaran di zaman Romawi kuno, Gereja Katolik Roma di abad pertengahan, dan negara-negara absolutis di

---

<sup>54</sup> Peter S. Heslam, *Creating a Christian Worldview: Abraham Kuyper's Lectures on Calvinism* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1998), 148.

<sup>55</sup> Heslam, 152.

<sup>56</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 90.

zaman modern.<sup>57</sup> Di sisi lain, individualis menjadikan seorang individu berdaulat dan bebas yang menjadi bangunan dari masyarakat. Semua institusi sosial seperti pernikahan, gereja, tempat kerja, tidak memiliki status pada dirinya sendiri, dan hanyalah bersifat buatan (artificial) yang tujuannya hanya untuk manfaat bagi manusia.<sup>58</sup> Kolektivis membatasi hak individu, sementara individualis kekurangan substansi sosial. Principled pluralism adalah alternatif bagi keduanya.

### Negara

Sebagai alternatif, principled pluralism menawarkan pandangan yang unik mengenai negara. Allah memberikan otoritas-Nya kepada semua bidang, termasuk negara. Negara bukanlah ilah yang mengatur seluruh moralitas dan memiliki hukum dan keadilan yang mutlak harus ditaati. Negara juga bukan bidang buatan manusia untuk dimanfaatkan hanya demi kepentingan manusia seperti pandangan individualis. Principled pluralism melihat peran pemerintah bersifat terbatas tetapi juga “ditinggikan.”<sup>59</sup> Di satu sisi, pemerintah adalah satu bidang yang setara dengan bidang-bidang sosial lainnya yang memiliki kuasa dan tanggung jawabnya sendiri dan dilarang untuk memaksakan otoritasnya kepada bidang-bidang lainnya. Namun dalam keadaan tertentu, negara memiliki pengaruh yang melebihi bidang lainnya.<sup>60</sup> Kuyper mengatakan “Does this mean that the government has no right whatsoever of

---

<sup>57</sup> Spykman, “The Principled Pluralist Position,” 79.

<sup>58</sup> Spykman, 79.

<sup>59</sup> Smidt, “The Principled Pluralist Perspective,” 136.

<sup>60</sup> Smidt, 136.

interference in these autonomous spheres of life? Not at all.”<sup>61</sup> Pertama, negara wajib mempertahankan keseimbangan antara bidang-bidang yang beragam. Jika terjadi suatu konflik, suatu bidang melewati garis batasnya, negara akan turun tangan untuk mengatur. Negara juga akan turun tangan jika dalam satu bidang tertentu terjadi pelanggaran penggunaan kekuasaan yang menindas orang lemah. Ketiga, negara memiliki hak memberlakukan pajak untuk mendukung aparat negara dan memfasilitasi tugas negara di dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan bangsa.<sup>62</sup> Maka dapat dikatakan bahwa dalam bagian tertentu negara punya kedudukan lebih tinggi dari bidang lainnya, tetapi ia tetap diawasi oleh konstitusi dan perwakilan rakyat.<sup>63</sup> Dalam Roma 13 pemerintah diberikan kuasa oleh Allah tetapi sekaligus menyatakan bahwa mereka hanyalah hamba Allah, bukan pemegang kuasa mutlak.

Selanjutnya, tugas pemerintah adalah menjamin keadilan. Keadilan di sini bukan hanya mengenai menghukum para pelanggar hukum, tetapi mengenai perlakuan yang adil bagi institusi-institusi yang ada serta individu-individu yang terlibat di berbagai bidang tersebut.<sup>64</sup> Negara dapat terlibat di institusi lain tetapi tidak boleh menguasainya. Misalnya negara harus turun tangan ketika terjadi diskriminasi dalam masyarakat, tetapi negara tidak dapat menentukan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Namun jika orang tua menganiaya anaknya secara fisik apalagi sudah mengancam nyawanya, maka negara berhak campur tangan untuk menghukum

---

<sup>61</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 97.

<sup>62</sup> Kuyper, 97.

<sup>63</sup> Heslam, *Creating a Christian Worldview*, 158.

<sup>64</sup> Skillen, *Recharging the American Experiment*, 84.

orang tua itu dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Ini merupakan penerapan konsep yang tidak bisa dilepaskan dari sphere sovereignty, yaitu sphere universality. Spykman mendefinisikan sphere universality sebagai “the cooperative relationship among the various social spheres; they should work together to promote wholesome community life.”<sup>65</sup> Principled pluralism bukan hanya sadar akan keanekaragaman bidang, tetapi juga menginginkan kesatuan tujuan. Maka sphere sovereignty yang menekankan diversitas, dan universalitas bidang yang menekankan kehidupan yang bersatu, adalah komplementer yang harus dijaga. Kedua konsep ini akan melawan uniformitas dan tirani di satu sisi, dan fragmentasi dan polarisasi di sisi yang lain.<sup>66</sup> Perhatian khusus Richard Neuhaus dan Peter Berger terhadap “mediating structures” untuk menjembatani antara kehidupan publik yang impersonal dan kehidupan pribadi yang personal sejalan dengan pemahaman kedaulatan dan universalitas bidang neo-Calvinis.<sup>67</sup>

Walaupun tugas pemerintah adalah mengejar keadilan, bukan berarti pemerintah mengejar moralitas itu sendiri. Bagian dari moralitas yang menjadi tugas pemerintah untuk diwujudkan adalah keadilan.<sup>68</sup> Tidak semua perbuatan amoral individu wajib dihukum oleh pemerintah. Seringkali hanya hukum keenam dan kedelapan dari sepuluh hukum Taurat yang juga menjadi hukum positif dalam pemerintahan sipil. Henry Meeter berpendapat bahwa negara tidak berkewajiban

---

<sup>65</sup> Spykman, “The Principled Pluralist Position,” 80.

<sup>66</sup> Spykman, 96.

<sup>67</sup> Spykman, 96.

<sup>68</sup> Stephen Monsma, *Pursuing Justice in a Sinful World* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1984), 47.

untuk menerapkan kesepuluh hukum tersebut. Ia memberi contoh hukum kesepuluh “jangan mengingini” di mana seseorang ketika melanggar hukum ini tidak akan dihukum oleh negara selama keinginan itu belum diwujudkan dalam perbuatan nyata.<sup>69</sup> Hukum sipil tidak berhak mengadili perkara yang berkaitan dengan hati, tetapi hanya yang berkaitan dengan lahiriah.<sup>70</sup> Negara dapat membuat aturan-aturan yang memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, tetapi tidak dapat mengatur pikiran dan hasrat hari seseorang.

Bagian penting lainnya mengenai pandangan principled pluralism terhadap negara adalah tugasnya sebagai agen anugerah umum, bukan anugerah khusus. Allah memberikan kuasa kepada pemerintah tetapi bukan untuk mengerjakan hal gerejawi. Negara bukan untuk memberitakan injil atau menjamin keselamatan jiwa manusia. Negara diberikan kuasa oleh Allah untuk memperhatikan kesejahteraan umum dari masyarakat. Negara tidak memiliki kuasa untuk menebus dosa manusia tetapi memiliki tugas untuk menopang tatanan ciptaan Allah. Tugas negara terbatas kepada penegakkan hukum dan keadilan publik. Maka principled pluralism tidak mengharapkan hasil yang sempurna dan utopia karena negara tidak akan sanggup membasmi segala kejahatan dan ketidakadilan sampai Kristus datang kedua kali.

### Hubungan Gereja dan Negara

Kuyper sangat menentang semangat Revolusi Perancis. Walaupun Kuyper mengakui bahwa Allah memakai Revolusi tersebut untuk menumbangkan tirani

---

<sup>69</sup> H. Henry Meeter, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme* (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008), 129.

<sup>70</sup> Meeter, 129.

dinasti Bourbon dan memberikan penghakimannya pada para pangeran yang menginjak rakyat dengan seenaknya, tetapi sekaligus adalah anti-Kristen. Namun Kuyper juga tidak menginginkan sistem teokrasi. Bagi Kuyper pemerintahan Allah secara langsung hanya terdapat di zaman Israel:

A theocracy was only found in Israel, because in Israel, God intervened immediately. For both by *Urim and Thummim* and by *Prophecy*; both by His saving miracles and by His chastising judgments, He held in His own hand the jurisdiction and the leadership of the people.<sup>71</sup>

Maka Kuyper menolak segala bentuk Caesaropapism yang menurut dia berlawanan dengan pendirian Calvinis:

....therefore neither the Caesaropapy of the Czar of Russia; nor the subjection of the State to the Church, taught by Rome; nor the “*Cuius regio eius religio*” of the Lutheran jurist; nor the irreligious neutral standpoint of the French Revolution; but that only the system of a free Church, in a free State, may be honored from a Calvinistic standpoint. The sovereignty of the State and the sovereignty of the Church exist side by side, and they mutually limit each other.<sup>72</sup>

Calvin yang mengutamakan kedaulatan Allah atas semua bidang juga menolak model kehidupan sosial Constantinian-medieval yang telah mendominasi Kekristenan Barat selama 1200 tahun.<sup>73</sup> Hanya firman Allah yang berotoritas masing-masing atas gereja dan negara secara unik, bukan berbagi kekuasaan di antara keduanya. Dalam Institutes IV.XX.1 Calvin katakan “Christ’s spiritual Kingdom and the civil jurisdiction are things completely distinct.” Dalam tafsiran Calvin pada 1 Petrus 2:12-17, “Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi,” (ayat 13), Calvin berpendapat:

---

<sup>71</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 85.

<sup>72</sup> Kuyper, 106–7.

<sup>73</sup> Spykman, “The Principled Pluralist Position,” 84.

The verb KTIZEIN in Greek, from which KTISIS comes, means to form or construct a building. It corresponds to the word “ordinance,” by which Peter reminds us that God the Maker of the world has not left the human race in state of confusion, so that we live after the manner of beast, but has given them, as it were, a building regularly formed, and divided into several compartments. It is called a human ordinance, not because it has been invented by men, but because it is a mode of living well-arranged and clearly ordered, appropriate to man.<sup>74</sup>

Di sini Calvin telah memiliki benih konsep structural pluralism walaupun hanya bidang gereja dan negara yang jelas ia bedakan, tetapi pemikiran Calvin bahwa Allah berdaulat atas setiap bidang akan konsisten dengan ide pluralisme struktural yang juga jelas membedakan batasan kedaulatan antara bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, perlu diingat bahwa Calvin hidup dalam konteks di mana orang pada umumnya masih berpikir bahwa Christendom akan terus berlanjut, Kristen akan terus mayoritas, dan belum mengantisipasi akan munculnya berbagai macam iman, baik iman agama maupun non-agama di ruang publik. Maka Calvin belum mengantisipasi akan adanya confessional pluralism.

Meskipun Kuyper mengaku dirinya adalah seorang murid dan penyalin (copyist) dari Calvin, tidak berarti ia harus menyetujui semua pemikiran Calvin. Henry Van Til berpendapat bahwa Kuyper adalah seorang penyalin Calvin namun bukan dengan mental penurut yang tidak kritis. Van Til menulis,

Kuyper's views have been called Neo-Calvinism, in spite of his own plea of faithfulness to the master, is due to the fact that Kuyper was not a slavish copyist but worked on in the spirit of Calvin. Hence we must not look for repristination pure and simple, nor an uncritical admiration of Calvin by his great disciple.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Spykman, 84.

<sup>75</sup> Spykman, 84.

<sup>76</sup> Henry R. Van Til, *The Calvinistic Concept of Culture* (Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2001), 117.

Salah satu keberatan Kuyper terhadap Calvin adalah tentang kewajiban negara dalam melawan segala bentuk penyembahan berhala dan agama yang salah.<sup>77</sup> Ia merujuk kepada Pengakuan Iman Belgia pasal 36,

And their office is, not only to have regard unto, and watch for the welfare of the civil state; but also that they protect the *sacred ministry*; and thus may *remove and prevent all idolatry and false worship*; that the kingdom of *antichrist* may be thus *destroyed* and the kingdom of Christ promoted.<sup>78</sup>

Yang Kuyper sayangkan adalah Pengakuan Iman ini mendapat restu yang bulat dari Calvin dan para pendukungnya yang menurut Kuyper justru bertentangan dengan Calvinisme.<sup>79</sup> Guido De Bres, penulis Pengakuan Iman Belgia, adalah murid Calvin yang pernah belajar di bawah Calvin di Frankfurt (1556), Lausanne (1559), dan Geneva (1559).<sup>80</sup> De Bres mengirim draft Pengakuan Iman Belgia ke Geneva sebelum diterbitkan untuk mendapatkan persetujuan.<sup>81</sup>

Poin Calvin ini sebelumnya sudah ia tulis dalam *Institutes* IV:XX:2 “civil government is designed, as long as we live in this world, to cherish and support the external worship of God, to preserve the pure doctrine of religion, to defend the Constitution of the church.” Calvin berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin “that idolatry, sacrileges against the name of God,

---

<sup>77</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 99.

<sup>78</sup> “The Belgic Confession (1561),” Ligonier Ministries, accessed August 1, 2018, <https://www.ligonier.org/learn/articles/belgic-confession-1561/>.

<sup>79</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 99.

<sup>80</sup> S.A. Strauss, “John Calvin and the Belgic Confession,” *In Die Skriflig* 27, no. 4 (1993): 504.

<sup>81</sup> Cornelis P. Venema, “The Belgic Confession,” *Tabletalk Magazine*, 2008.

blasphemies against his truth, and other offenses against religion may not openly appear and be disseminated among the people....”<sup>82</sup>

Kuyper berargumen bahwa negara yang diwajibkan untuk melawan segala bentuk berhala dan agama yang salah tidak terdapat dalam Calvinisme tetapi dari Konstantinus Agung yang merupakan reaksi dari penganiayaan yang dilakukan oleh kaisar kafir sebelumnya terhadap para pengikut Yesus. Sistem ini dianut oleh Katolik Roma selama ratusan tahun. Reformator banyak mereformasi ajaran Katolik Roma, tetapi dalam hal menggunakan kuasa pemerintah untuk menghukum bidat, belum mengalami reformasi. Francois Wendel mencatat bahwa,

Calvin was convinced, and all the reformers shared this conviction, that it was the duty of a Christian magistrate to put to death blasphemers who kill the soul, just as they punished murderers who kill the body.<sup>83</sup>

Philipp Melancthon menanggapi penghukuman Servetus dengan menulis surat kepada Calvin 14 Oktober 1554 untuk menyatakan persetujuannya:

I have read the writing in which you have refuted the detestable blasphemies of Servetus, and I return thanks to the Son of God who was the arbiter of your combat. To you also, the Church owes, and will in the future owe, gratitude. I am in entire agreement with your judgment. I affirm also that your Magistracy has acted justly in putting this blasphemer to death after a regular trial.<sup>84</sup>

Calvin sendiri tidak memasukan kewajiban negara untuk menghukum penista agama ke dalam Pengakuan Iman Jenewa tahun 1536 pasal 21, tetapi pengakuan iman

---

<sup>82</sup> Calvin, *Institutes*.

<sup>83</sup> François Wendel, *Calvin: Origins and Development of His Religious Thought*, trans. Philip Mairet, 1st Labyrinth Press Ed edition (Baker Academic, 1995), 97.

<sup>84</sup> Wendel, 97.

lainnya yang memasukan. Selain Pengakuan Iman Belgia pasal 36, yang juga memasukannya adalah Pengakuan Iman Westminster pasal 23,

It is the duty to take order, that unity and peace be preserved in the Church, that the truth of God be kept pure and entire, that all blasphemies and heresies be suppressed, all coruptions and abuses in worship and discipline prevented or reformed, and all the ordinances of God duly settled, administered, and observed.<sup>85</sup>

Pengakuan Iman Skotlandia pasal 24,

.... not only they are appointed for civil policy, but also for maintenance of the true religion, and for suppressing of idolatry and superstition whatsoever: as in David, Jehoshaphat, Hezekiah, Josiah, and others, highly commended for their zeal in that case, may be espied.<sup>86</sup>

Pengakuan Iman Helvetika Kedua pasal 30,

.... he promotes the preaching of the truth and sincere faith, roots out lies and all superstition, together with all impiety and idolatry, and defends the Church of God.  
.... Let him suppress stubborn heretics (who are truly heretics), who do not cease to blaspheme the majesty of God and to trouble, and even to destroy the Church of God.<sup>87</sup>

Bagi Kuyper, negara justru wajib untuk toleran terhadap berbagai jenis denominasi gereja karena negara tidak berkompentensi untuk menghakimi hal spiritual, dan negara akan menyalahi kedaulatan gereja.<sup>88</sup> Di tahun 1890an Kuyper mengajukan penghapusan kata-kata “*thus may remove and prevent all idolatry and false worship*”

---

<sup>85</sup> “Westminster Confession of Faith,” accessed August 1, 2018, [https://reformed.org/documents/wcf\\_with\\_proofs/](https://reformed.org/documents/wcf_with_proofs/).

<sup>86</sup> “Scottish Confession of Faith (1560),” accessed August 1, 2018, <http://www.swrb.com/newslett/actualNLS/ScotConf.htm#CH24>.

<sup>87</sup> “The Second Helvetic Confession,” accessed August 1, 2018, <https://www.ccel.org/creeds/helvetic.htm>.

<sup>88</sup> Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 105.

dari Pengakuan Iman Belgia pasal 36.<sup>89</sup> Tahun 1905 referensi pada pasal 36 yang berkaitan dengan kewajiban negara melawan agama yang salah telah dihapus oleh the General Synod of the Reformed Churches di Belanda. Demikian Pengakuan Iman Westminster direvisi oleh gereja Presbyterian di Amerika tahun 1900, khususnya pasal 23 mengalami penulisan ulang secara total.<sup>90</sup>

Alasan gereja Reformed dan Presbyterian merevisi pasal-pasal dalam beberapa pengakuan iman mengenai tugas pemerintah adalah berdasarkan Alkitab. Ayat yang dipakai untuk mendukung Pengakuan Iman Belgia pasal 36 misalnya 1 Raja-Raja 15:12 mengenai raja Asa menyingkirkan pelacuran bakti dan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya, lalu 2 Raja-Raja 23 mengenai reformasi Yosia di mana dicatat para imam bukit pengorbanan disembelih olehnya. Penggunaan ayat-ayat ini untuk membenarkan campur tangan negara untuk membasmi berhala adalah tidak tepat karena konteks Israel sebagai bangsa pilihan Allah sudah tidak sama dengan hari ini dan tidak dapat diberlakukan kepada gereja atau negara mana pun. Hari ini tidak ada lagi bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Tidak ada pemimpin yang memiliki posisi seperti raja Daud yang tugasnya mengatur liturgi dan mempersiapkan pembangunan bait Allah. Gereja pun hari ini sebagai umat Allah, dalam melaksanakan disiplin gereja kepada jemaatnya sendiri, tidak seperti zaman Israel yang menyembelih atau membakar nabi palsu.

---

<sup>89</sup> L. Kalsbeek, *Contours of a Christian Philosophy*, ed. Bernard Zylstra and Josina Zylstra (Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1975), 229.

<sup>90</sup> "American Revisions to the Westminster Confession of Faith," accessed August 2, 2018, [https://www.opc.org/documents/WCF\\_orig.html](https://www.opc.org/documents/WCF_orig.html).

Lebih lanjut mengenai Israel, meskipun saat itu memiliki status sebagai umat Allah, mereka tetap menghargai kebebasan beragama. Yang perlu diingat, perintah Allah “Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku” adalah perintah ini ditujukan kepada Israel, bukan kepada bangsa lain. Menurut Paul Marshall, bangsa di luar Israel dibebaskan untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Marshall mencatat,

Israel was called to be a particular nation whose political and social order rested on belief and trust in Yahweh, an order that would be radically disrupted if other religious ways of life intruded. However, the surrounding nations were left free to follow their own faiths.<sup>91</sup>

Bahkan ketika ada bangsa asing yang tinggal di Israel, mereka pun tidak dipaksa pindah agama. Keluaran 20:21 ”Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.” Keluaran 23:9 “Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.” Israel dalam perbudakan di Mesir tetap dibebaskan untuk beriman dan menyembah Allah. Mereka mengerti bagaimana menjadi penduduk asing, maka mereka memperlakukan orang asing di tanah mereka dengan baik.

Namun Marshall juga mencatat adanya pengecualian<sup>92</sup> dalam Imamat 20:2:

"Engkau harus berkata kepada orang Israel: Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu.

---

<sup>91</sup> Paul Marshall, *God and the Constitution: Christianity and American Politics* (Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2002), 114.

<sup>92</sup> Marshall, 115.

Di sini hukuman mati diberlakukan kepada orang Israel maupun orang asing. Alasannya adalah karena penyembahan kepada Molokh mengikutsertakan penyerahan anak-anak. Di sini mengindikasikan bahwa ada praktek agama tertentu yang tidak boleh ditoleransi dalam konteks Israel sebagai bangsa pilihan Allah.

Jika di Perjanjian Lama terdapat toleransi kepada agama lain, Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Gereja yang adalah umat Allah sudah tidak lagi diikat oleh jenis suku dan wilayah teritorial sehingga lebih lebar membuka pintu kepada orang manapun untuk masuk tetapi bukan dengan paksaan. Rasul-rasul yang adalah utusan langsung dari Kristus tidak berkhotbah dengan paksaan, tetapi dengan undangan untuk menerima Yesus. Lebih lanjut, Skillen berpendapat bahwa Yesus bukan saja memerintahkan untuk tidak memaksa tetapi justru harus mengasihi musuh dan memperjuangkan kesejahteraan mereka yang mungkin berbuat jahat kepada kita.<sup>93</sup>

Jika kembali kepada principled pluralism, apa yang Kuyper lawan adalah pelanggaran terhadap confessional pluralism yang juga mengakibatkan pelanggaran terhadap structural pluralism. Negara yang membasmi suatu denominasi tertentu atau bahkan bidat berarti tidak mengakui atau tidak toleran terhadap pluralitas iman warganya dan sudah melanggar confessional pluralism. Pada saat yang sama, negara sedang merebut kedaulatan agama dalam menentukan ajarannya sendiri, yang berarti menyalahi structural pluralism. Menurut Jonathan Chaplin, confessional pluralism sangat bergantung kepada structural pluralism.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> James W. Skillen, ed., *Confessing Christ and Doing Politics* (Center for Public Justice, 1802), 55.

<sup>94</sup> Jonathan Chaplin, "Christianity, the State and Religious Pluralism" (March 28, 2018).

Masalah lainnya mengenai pelanggaran terhadap confessional pluralism adalah mereduksinya hanya kepada kehidupan privat dan ibadah sempit dalam gereja lokal saja. Confessional pluralism tidak cukup dengan sekadar memproteksi gereja atau tempat ibadah agama lain. Confessional pluralism harus dimengerti tentang pengertian agama yang menyeluruh. Marshall menjelaskan bahwa,

Religion – whether true or false – is not only a matter of participating in religious ceremonies or embracing a set of purely theological beliefs, it is not simply the formal act of worshipping God or an idol. It is about the *core beliefs* that shape human life. Hence, freedom of religion is far more than freedom of worship. It necessarily *includes freedom of thought, freedom of assembly, and freedom of speech*. Conversely, denying religious freedom can also mean denying these things as well. Religion and worship, whether true or false, are intimately tied to living out what we believe in our lives.<sup>95</sup>

Menyempitkan agama hanya ke dalam masalah privat adalah pandangan dari sekularisme. Mereka berpikir bahwa dunia publik adalah milik sekular dan bebas dari pemikiran religius. Bagi principled pluralism pandangan ini jelas tidaklah adil. Padahal principled pluralism bukan menolak keberadaan orang yang memiliki cara pandang atau iman non-agama untuk hidup bersama di dunia publik karena itu adalah bagian dari confessional pluralism yang menjamin kebebasan berpikir, berkumpul, dan berbicara. Namun yang dilakukan oleh penganut sekularisme adalah menolak keberadaan penganut cara pandang atau iman agama untuk dibicarakan di ranah publik. Maka dapat dikatakan bahwa kaum sekularis sedang melawan kebebasan beragama. Padahal agama Kristen misalnya, diperintahkan oleh kitab sucinya untuk mempraktekkan imannya di seluruh aspek hidup, bukan hanya di gereja. Orang Kristen dipanggil untuk masuk dalam bidang hukum, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan segala bidang kehidupan yang nyata setiap hari. Maka pemerintah

---

<sup>95</sup> Marshall, *God and the Constitution*, 114.

seharusnya menjamin kebebasan beragama yang diekspresikan dalam setiap profesi seseorang. Jika menyempitkan kebebasan beragama hanya di wilayah privat berarti sama saja dengan tidak mengakui kebebasan beragama.

Pandangan sekularisme di atas juga mengasumsikan adanya dasar netral yang sifatnya non-religius. Principled pluralism menentang pandangan tersebut karena seluruh hidup manusia bersifat religius baik agama dan non-agama sekalipun sama-sama memiliki presuposisi dasar mengenai apapun yang mereka praktekan di wilayah privat maupun publik. Misalnya seseorang memperjuangkan tentang keadilan yang ia klaim bukan dari konsep agama mana pun, jika ditelusuri mungkin saja ia memakai pemikiran filsafat Yunani atau yang lainnya. Artinya setiap orang tidak bisa lepas dari presuposisi tertentu sehingga tidak mungkin melarang orang lain untuk memiliki presuposisi tertentu juga.

Salah satu tuduhan kepada principled pluralism adalah konsep ini memimpin kepada perang kebudayaan. Skillen melawan pandangan yang berpendapat bahwa konflik kebudayaan secara sederhana disebabkan oleh permusuhan politik dan sosial yang memiliki dasar sistem moral yang berbeda yang pada ujungnya adalah satu budaya mendominasi kebudayaan yang lainnya.<sup>96</sup> Tetapi dari pengamatan Skillen, konflik antara Protestan dan Katolik di Amerika misalnya, bukan disebabkan oleh alasan moral atau religius, tetapi karena perebutan mengenai status sekolah. Di sini perang kebudayaan terjadi bukan karena perbedaan theologi atau cara pandang yang diajarkan oleh agama masing-masing, tetapi karena kepentingan lain.

---

<sup>96</sup> Skillen, *Recharging the American Experiment*, 87.

### Principled pluralism dan Relativisme

Principled pluralism adalah suatu argumentasi moral untuk negara yang adil yang bersifat utuh dan bukan sebagai ekspresi dari relativisme moral.<sup>97</sup> Principled pluralism tentu mengakui adanya kebenaran sehingga memandang bahwa tidak semua praktek hidup sosial manusia adalah benar. Tentu ada pandangan ekonomi yang salah, politik yang salah, seni yang salah, keluarga yang salah, dan seterusnya. Principled pluralism terbatas dalam tujuannya untuk adanya kejelasan normatif di bidang hukum dan politik.<sup>98</sup> Pemerintah harus berdasarkan konstitusi untuk menyatukan masyarakat di bawah hukum dan menjamin setiap warga negara diperlakukan sama dan dilindungi dengan baik. Principled pluralism mengafirmasi bahwa sistem negara hanya boleh satu. Ketika mengatakan bahwa negara harus dibatasi dan harus mengakui kedaulatan dalam bidang-bidang lainnya, tidak berarti kedaulatan negara yang telah memiliki satu jenis sistem pemerintahan boleh disaingi oleh sistem lain. Sistem pancasila misalnya, akan terancam jika ada golongan yang menjalankan sistem negara agama.

Demikian halnya tentang kebebasan beragama. Ketika principled pluralism tidak menyetujui gereja melakukan hukuman mati kepada Servetus, tidak berarti sedang membela ajaran bidat yang dianut oleh Servetus melainkan membela hak dia untuk hidup dan berpendapat. Tetapi jika apa yang ia lakukan adalah perbuatan

---

<sup>97</sup> Skillen, 99.

<sup>98</sup> Skillen, 99.

kriminal secara hukum maka ia boleh diproses sesuai hukum yang berlaku. Berarti kebebasan beragama pun bukan sebebaskan-bebasnya.